



Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Di Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya

Indry Fitriyani¹, Arifah Rosmayudi², Ari Ramdani³

^{1,2,3} Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

¹indryfitriyani12@gmail.com, ²Arifahrosmajudi@gmail.com, ³dosenmuda1983@gmail.com

Abstrak

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan inisiatif nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, serta partisipasi sosial perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga dalam kondisi rentan secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program PEKKA di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan data yang diperoleh berupa informasi kualitatif yang dianalisis secara mendalam sesuai dengan dinamika temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PEKKA di Kota Tasikmalaya secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan yang ditetapkan. Program telah memiliki standar dan sasaran yang jelas, sumber daya yang relatif memadai, mekanisme komunikasi antarorganisasi yang berjalan, struktur pelaksana yang sesuai, serta sikap pelaksana yang cenderung positif. Dukungan kondisi sosial dan politik daerah juga cukup kondusif dalam menunjang pelaksanaan program. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah pendamping, variasi tingkat keaktifan kelompok, keterbatasan anggaran, serta tantangan sosial ekonomi penerima manfaat yang memengaruhi optimalisasi hasil program. Secara keseluruhan, implementasi Program PEKKA di Kota Tasikmalaya dapat dikategorikan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, koordinasi, dan pemerataan pelaksanaan agar tujuan pemberdayaan perempuan kepala keluarga dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Perempuan, PEKKA

Abstrac

The Women-Headed Household Empowerment Program (PEKKA) is a national initiative aimed at improving the capacity, economic independence, and social participation of women who serve as heads of households in economically, socially, and psychologically vulnerable conditions. This study aims to analyze the implementation of the PEKKA Program in Tasikmalaya City. The research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were analyzed in depth based on field findings. The results indicate that the implementation of the PEKKA Program in Tasikmalaya City has generally been carried out in accordance with the established policy framework. The program has clear standards and objectives, relatively adequate resources, functioning inter-organizational communication, an appropriate implementing structure, and generally positive implementer attitudes. Social and political conditions in the region are also supportive of program implementation. However, several challenges remain, including limited facilitators, variations in group activeness, budget constraints, and socio-economic barriers faced by beneficiaries, which affect the program's optimal outcomes. Overall, the implementation of the PEKKA Program in Tasikmalaya City can be categorized as fairly good, although improvements in resources, coordination, and equitable implementation are needed to achieve more optimal and sustainable empowerment outcomes.

Keywords: Policy Implementation, Women Empowerment, PEKKA

1. Pendahuluan

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan salah satu bentuk inisiatif nasional yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berada dalam posisi rentan ekonomi, sosial, maupun psikologis. Semakin meningkatnya kebutuhan rumah tangga, namun tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi yang mencukupi membuat para istri atau perempuan ikut serta dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beban tersebut tidak hanya menuntut ketahanan ekonomi, tetapi juga menuntut ketahanan mental dalam menghadapi segala tekanan hidup.

Dalam realitas sosial, perempuan kepala keluarga sering kali berada dalam kondisi ketidaksetaraan struktural yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Minimnya keterampilan, rendahnya tingkat pengetahuan Pendidikan formal, serta terbatasnya jaringan sosial dan ekonomi sehingga menyebabkan posisi mereka terpinggirkan di berbagai bidang kehidupan. Aspek sosial dan budaya berperan besar dalam efektivitas kebijakan, dalam hal ini pendekatan pemberdayaan harus disesuaikan dengan nilai lokal agar dapat diterima secara sosial, mengingat Sebagian dari mereka yang menjadi perempuan kepala keluarga masih merasa rendah diri atau terbatas oleh kultur sosial di masyarakat. Kesadaran akan pentingnya Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) mendorong pemerintah untuk merancang program yang mampu memperkuat kapasitas mereka secara berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Di Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya

Program ini pertama kali dikembangkan oleh Yayasan PEKKA sejak tahun 2000. Tujuannya adalah menciptakan perempuan yang mandiri secara ekonomi, berdaya dalam pengambilan keputusan, serta mampu memperkuat ketahanan keluarga melalui akses terhadap Pendidikan, modal usaha, dan jejaring sosial. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan kelompok perempuan yang menghadapi tantangan berat. Mereka tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Semakin banyaknya tuntutan ekonomi, serta kebutuhan rumah tangga yang semakin membesar, dan minimnya pemasukan yang memadai menuntut perempuan untuk turut serta menambah pendapatan keluarga. Dari kondisi tersebut mereka dituntut untuk memiliki kemandirian, kemampuan berwirausaha, keterampilan kerja, serta akses terhadap berbagai peluang ekonomi yang layak. Dalam konteks pembangunan, perempuan yang menjadi kepala keluarga harus dijadikan kelompok prioritas karena kerentanan mereka secara langsung memengaruhi kesejahteraan keluarga dan anak-anak. Jika mereka tidak mendapatkan akses yang cukup, hal tersebut bisa mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia di kemudian hari. Pemerintah perlu melihat kelompok perempuan ini sebagai pihak utama dalam pembangunan yang layak didukung melalui kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan kepala keluarga menjadi sangat penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi perempuan serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki potensi besar sekaligus memiliki tantangan dalam hal pemberdayaan perempuan. Berdasarkan data Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya (2024), masih banyak ratusan kepala keluarga perempuan yang tergolong kategori miskin dan bekerja di sektor informal dengan pendapatan dibawah rata-rata Upah Minimum Kota (UMK). Kondisi ini menjadikan perempuan kepala keluarga sebagai salah satu sasaran bagi program PEKKA. Selain itu, data nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang di kepala oleh perempuan terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2024, tercatat lebih dari 11,5 juta rumah tangga di Indonesia dipimpin oleh perempuan (Kompas, 2024). Angka ini menunjukkan meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam rumah tangga, berarti meningkat pula jumlah perempuan yang harus memikul tanggung jawab ganda yakni menjadi tulang punggung keluarga dan menjadi ibu rumah tangga.

Pertumbuhan jumlah perempuan kepala keluarga ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah kota Tasikmalaya, khususnya dalam menyediakan kebijakan sosial yang adil gender. Banyak dari mereka yang kesulitan mengakses Pendidikan, modal, dan pekerjaan serta menghadapi stigma sosial yang merendahkan posisi mereka. Melalui program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), program ini memfokuskan pelatihan bagi para peserta khususnya perempuan yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor diantaranya seperti cerai hidup, ditinggal meninggal suami, perempuan yang masih memiliki suami namun peran suaminya tidak ada, atau anak perempuan di dalam keluarga yang menjadi tulang punggung.

Program ini sejalan dengan Peraturan Menteri PPPA No 7 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2022 yang menegaskan bahwa negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, serta akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan sosial secara inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks tasikmalaya Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah wujud konkret dari kebijakan lokal di bidang pemberdayaan perempuan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kota Tasikmalaya. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan perempuan kepala keluarga melalui aktivitas seperti pelatihan, pendampingan, dan penguatan ekonomi produktif. Melalui kegiatan ini, diharapkan para perempuan kepala rumah tangga mampu mengembangkan potensi diri, menciptakan produk yang bernilai ekonomi, serta memperoleh tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pelaksanaan program PEKKA di kota Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 8 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tahun 2015 yang menunjukkan dedikasi pemerintah setempat untuk mencapai kesetaraan gender, keadilan, serta perlindungan perempuan dan anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan peran, posisi, dan potensi perempuan dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, dan keluarga. Sebagai kelanjutan dari peraturan daerah tersebut, pemerintah kota Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya No 102 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Tahun 2016 yang menjadi landasan operasional untuk menjalankan program-program pemberdayaan perempuan secara komprehensif. Program PEKKA ini bukan lagi inisiatif mandiri, melainkan realisasi dari kebijakan daerah yang diatur melalui perda No.8 tahun 2015 dan Perwalkot No. 102 Tahun 2016. Kedua regulasi tersebut berfungsi sebagai pondasi hukum dan panduan kebijakan yang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Pelaksanaannya pun melibatkan berbagai lembaga daerah terkait, terutama DPPKBP3A yang bertindak sebagai sektor utama yang mengkoordinasikan dan menjalankan program pemberdayaan perempuan. Disamping itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan dukungan ekonomi melalui pelatihan bisnis dan akses pasar, sedangkan Dinas Tenaga Kerja membantu meningkatkan keterampilan kerja dan kesempatan pekerjaan.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) oleh Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 dilaksanakan melalui pembentukan dan pembinaan sejumlah kelompok usaha yang tersebar di beberapa kecamatan. Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas keterampilan dan penguatan ekonomi perempuan kepala keluarga melalui pelatihan serta praktik produksi sesuai dengan jenis usaha yang dipilih. Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelatihan teknis, pendampingan, serta praktik produksi secara langsung sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi peserta.

Di Kecamatan Indihiang, kelompok Kamboja Mandiri yang beranggotakan 17 orang menjalankan usaha makanan ringan dengan kegiatan berupa pelatihan dan produksi makanan ringan secara berkelompok. Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh kelompok Aster II di Kecamatan Bungursari dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang serta kelompok Dahlia di Kecamatan Mangkubumi yang juga beranggotakan 12 orang. Ketiga kelompok tersebut mendapatkan pembinaan dalam bentuk pelatihan pembuatan makanan ringan serta praktik produksi untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas anggota kelompok.

Sementara itu, di Kecamatan Purbaratu terdapat lima kelompok yang seluruhnya bergerak di bidang usaha makanan ringan, yaitu kelompok Sukanagara dengan 7 orang peserta, Sukamenak dengan 12 orang peserta, Suka Asih dengan 12 orang peserta, Sukajaya dengan 12 orang peserta, serta Singkup dengan 12 orang peserta. Kelima kelompok ini mendapatkan bentuk pembinaan yang sama berupa pelatihan teknis pengolahan makanan ringan serta kegiatan produksi bersama. Konsentrasi kelompok di Kecamatan Purbaratu menunjukkan adanya fokus pengembangan usaha mikro berbasis rumah tangga di wilayah tersebut, sekaligus menjadi strategi penguatan ekonomi perempuan kepala keluarga secara kolektif.

Di Kecamatan Mangkubumi, selain kelompok Dahlia yang bergerak di bidang makanan ringan, terdapat pula kelompok Dinar dengan jumlah peserta paling banyak yaitu 22 orang yang juga menjalankan usaha makanan ringan melalui pelatihan dan produksi bersama. Tidak hanya pada sektor makanan ringan, Kecamatan Mangkubumi juga menjadi lokasi pengembangan keterampilan di bidang jasa dan kerajinan. Kelompok Hawa Pekka Sekoper Cinta yang beranggotakan 12 orang mendapatkan pelatihan tata rias wajah dan hijab untuk membuka jasa rias berbagai acara. Kelompok Tata Boga Ceria Pekka Sekoper Cinta dengan 12 orang peserta dilatih dalam bidang kuliner dengan fokus pada pengolahan berbagai menu hidangan. Selain itu, kelompok Anggrek Pekka Sekoper Jabar yang beranggotakan 11 orang memperoleh pelatihan pangkas rambut sebagai bekal membuka jasa potong rambut, serta kelompok Merajut dengan 17 orang peserta mendapatkan pelatihan keterampilan merajut dan memproduksi berbagai barang rajutan.

Tabel 1. 1 Pelaksanaan Program PEKKA Oleh Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No	Nama Kelompok	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Jenis usaha kelompok	Keterangan
1	Bougenville Pekka Sekoper Jabar	Kecamatan Cibeureum	12 Orang	Tata Boga	Dilatih dalam bidang kuliner menu menu hidangan
2	Pekobar Pekka Sekoper Jabar	Kecamatan Cibeureum	22 Orang	Tata Rias	Mendapatkan pelatihan tata rias wajah dan hijab untuk jasa makeup berbagai acara
3	Sakura Pekka Sekoper Jabar	Kecamatan Cibeureum	22 Orang	Menjahit	Mendapatkan pelatihan teknik pola dasar menjahit
4	Kenangan Pekka Sekoper Jabar	Kecamatan Cibeureum	27 Orang	Makanan Ringan	Melakukan pelatihan dan produksi makanan ringan

Sumber Data Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya tahun 2024

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) oleh Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 menunjukkan penguatan kegiatan pemberdayaan yang terfokus di Kecamatan Cibeureum. Program ini dilaksanakan melalui pembentukan dan pembinaan kelompok usaha dengan variasi jenis keterampilan yang lebih beragam dibandingkan tahun sebelumnya. Pendekatan yang digunakan tetap berbasis kelompok, dengan metode pelatihan teknis, praktik langsung, serta pendampingan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan kepala keluarga.

Salah satu kelompok yang dibina adalah Bougenville Pekka Sekoper Jabar dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang yang bergerak di bidang tata boga. Kelompok ini mendapatkan pelatihan dalam pengolahan berbagai menu hidangan, baik dari segi teknik memasak, penyajian, maupun pengelolaan usaha kuliner skala kecil. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha makanan secara mandiri maupun berkelompok sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga.

2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan merupakan sebagai konsep yang mencakup serangkaian keputusan dan langkah-langkah yang dirancang secara terstruktur oleh pihak yang berwenang, terutama pemerintah, guna mengatasi isu-isu publik. Kebijakan (policy) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlancar kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (political), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketentuan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan).

Adapun kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan ini muncul sebagai hasil dari suatu proses yang mencakup penyusunan sasaran, serta penentuan atau metode pendekatan yang dinilai paling efisien untuk mewujudkan sasaran tersebut. Oleh karena itu kebijakan tidak semata-mata dianggap sebagai undang-undang atau dokumentasi resmi tetapi juga meliputi dedikasi, pandangan, dan orientasi langkah yang berfungsi sebagai panduan bagi aparat pemerintah membimbing kehidupan bermasyarakat. Maka kebijakan memainkan peran krusial sebagai alat untuk pengambilan keputusan publik, dengan tujuan membangun ketertiban, keadilan, dan kemakmuran di tengah masyarakat.

Kebijakan juga tidak lepas dari proses kebijakan, proses kebijakan ini merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Setiap tahapan dalam proses kebijakan saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Dye dalam (Anggara, 2015) ada beberapa proses kebijakan diantaranya:

Identifikasi masalah (problem identification). Identifikasi masalah kebijakan melalui tuntutan dari individu atau kelompok untuk kegiatan pemerintah.

Agenda setting. Fokus perhatian dari media massa dan pejabat publik dalam masalah publik secara khusus untuk memutuskan hal-hal yang akan diputuskan.

Perumusan usul kebijakan (policy formulation). Penentuan agenda permasalahan dan pengusulan program untuk penyelesaian masalah.

Pengesahan kebijakan (policy legitimation). Memilih suatu usulan, pembentukan dukungan politik untuk usulan tersebut, dan mengesahkan sebagai undang-undang hukum.

Pelaksanaan kebijakan (policy implementation).

Pada tahap ini, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang telah dianalisis berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dengan konteks sosial-politik di lapangan. Proses penentuan kebijakan tidak hanya melibatkan pertimbangan teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan sumber daya yang tersedia. Menurut Abidin dalam (Anggara, 2015) terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, yaitu sebagai berikut:

Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.

Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.

Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.

Adil.

Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Tahap penentuan kebijakan ini menjadi penghubung penting karena keputusan yang dibuat akan menjadi dasar bagi langkah-langkah operasional dan alokasi sumber daya. Sekaligus memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan pelaksanaan, dan mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, sering ditemukan perbedaan antara perencanaan dan hasil yang ingin dicapai. Permasalahan kebijakan muncul ketika kebijakan yang ada belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Adapun ciri-ciri masalah kebijakan menurut Dunn dalam (Away, 2016) yaitu sebagai berikut:

Saling ketergantungan dari masalah kebijakan, dalam arti masalah kebijakan dalam satu bidang dapat mempengaruhi masalah kebijakan bidang-bidang lain.

Subyektivitas dari masalah kebijakan, artinya bahwa masalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu.

Sifat buatan dari masalah, artinya masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah, masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia.

Dinamika masalah kebijakan artinya masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konsisten dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan.

Untuk menganalisis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Van, 1975) Model ini memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Variabel tersebut meliputi:

Policy Standards And Objectives (Standar dan Tujuan Kebijakan)

the identification of performance indicators is a crucial stage in the analysis. Essentially, performance indicators assess the extent to which the policy's standards and objectives are realized. (Identifikasi indikator kinerja merupakan tahap penting dalam analisis. Pada dasarnya, indikator kinerja menilai sejauh mana standar dan tujuan kebijakan tersebut terwujud)

Policy Resources (Sumber Daya Kebijakan)

These resources may include funds or other incentives in the program that might encourage or facilitate effective implementation. (Sumber daya ini dapat mencakup dana atau insentif lain dalam program yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi yang efektif.)

Interorganizational Communication and Enforcement Activities (Komunikasi dan Aktivitas Penegakan Antarorganisasi)

Effective implementation requires that a program's standards and objectives be understood by those individuals responsible for their achievement. Hence, it is vital that we concern ourselves with the clarity of standards and objectives, the accuracy of their communication to implementors. Communication within and between organizations is a complex and difficult process. (Implementasi yang efektif membutuhkan pemahaman standar dan tujuan program oleh individu-individu yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Oleh karena itu,

sangat penting bagi kita untuk memperhatikan kejelasan standar dan tujuan, serta ketepatan komunikasinya kepada para pelaksana. Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan proses yang kompleks dan sulit.)

Characteristics of the Implementing Agencies Numerous (Karakteristik Organisasi Pelaksana)

Numerous factors are included in this component of the model. Students of bureaucratic politics have identified many characteristics of administrative agencies that affect their policy performance. (Banyak faktor yang termasuk dalam komponen model ini. Para mahasiswa ilmu politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik lembaga administrasi yang memengaruhi kinerja kebijakan mereka.)

Economic, Social, and Political Conditions (Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik)

The impact of economic, social, and political conditions on public policy has been the focus of much attention during the past decade. Although the impact of these factors on the implementation of policy decisions has received little attention, they may have a profound effect on the performance of implementing agencies. (Dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap kebijakan publik telah menjadi fokus perhatian selama dekade terakhir. Meskipun dampak faktor-faktor ini terhadap implementasi keputusan kebijakan kurang mendapat perhatian, faktor-faktor tersebut dapat memiliki pengaruh yang mendalam terhadap kinerja lembaga pelaksana.)

Disposition of Implementors (Disposisi atau Sikap Pelaksana)

The implementors' understanding of the general intent, as well as the specific standards and objectives of the policy, is important. Moreover, successful implementation may be frustrated when officials are not aware that they are not in full compliance with the policy. (Pemahaman para pelaksana mengenai maksud umum, serta standar dan tujuan spesifik dari kebijakan tersebut, sangatlah penting. Terlebih lagi, keberhasilan implementasi dapat terhambat ketika para pejabat tidak menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan tersebut.)

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data diarahkan oleh temuan-temuan faktual yang muncul selama kegiatan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kota Tasikmalaya. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, bukan angka.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan salah satu variabel penting dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam perspektif teori Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana standar kebijakan dirumuskan secara jelas serta sasaran kebijakan ditetapkan secara spesifik dan terukur. Standar kebijakan mencakup ukuran keberhasilan, indikator capaian, serta pedoman operasional yang menjadi acuan bagi pelaksana. Sementara itu, sasaran kebijakan berkaitan dengan kelompok atau pihak yang menjadi target intervensi program. Apabila standar dan sasaran dirumuskan secara jelas, maka pelaksana akan lebih mudah memahami tujuan program dan mengarahkan tindakan sesuai dengan ekspektasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, sumber daya merupakan variabel krusial yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, waktu, serta dukungan informasi yang memadai. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa meskipun standar dan sasaran kebijakan telah dirumuskan secara jelas, implementasi tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang cukup dan berkualitas.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, komunikasi antar organisasi merupakan salah satu variabel penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi tidak hanya dipahami sebagai penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kejelasan pesan, konsistensi instruksi, serta koordinasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada seluruh pihak yang terlibat.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik ini mencakup struktur birokrasi, pola hubungan kerja, norma internal organisasi, serta kapasitas institusional dalam menjalankan program. Menurut Van Meter dan Van Horn, organisasi pelaksana yang memiliki struktur jelas, pembagian tugas yang tegas, serta prosedur kerja yang terstandar akan lebih mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata secara efektif dan konsisten.

5. Disposisi Pelaksana

Dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana merupakan variabel yang berkaitan dengan sikap, komitmen, tingkat penerimaan, serta kepatuhan aparaturnya terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Disposisi ini mencerminkan sejauh mana para pelaksana memiliki kemauan dan kesungguhan dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn, meskipun sumber daya memadai dan struktur organisasi jelas, implementasi kebijakan dapat mengalami kegagalan apabila pelaksana tidak memiliki sikap yang positif dan komitmen yang kuat terhadap kebijakan tersebut.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan variabel lingkungan eksternal yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat, tingkat kesejahteraan ekonomi sasaran program, serta situasi politik dan dukungan kebijakan yang berkembang di daerah. Menurut Van Meter dan Van Horn, lingkungan eksternal yang kondusif akan memperkuat implementasi kebijakan, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi faktor penghambat meskipun aspek internal organisasi telah berjalan baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) oleh Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

Implementasi Kebijakan Program PEKKA oleh Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya

Implementasi Kebijakan Program PEKKA di Kota Tasikmalaya secara umum telah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan kerangka kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis enam variabel dalam model Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas, sumber daya yang cukup mendukung, mekanisme komunikasi antarorganisasi yang berjalan, karakteristik agen pelaksana yang relatif sesuai, disposisi pelaksana yang cenderung positif, serta dukungan kondisi sosial dan politik daerah yang cukup kondusif.

Dari aspek standar dan sasaran kebijakan, Program PEKKA telah memiliki tujuan yang terarah, yaitu meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, serta partisipasi sosial perempuan kepala keluarga. Sasaran program juga telah ditetapkan secara spesifik, yakni perempuan yang menjadi kepala keluarga karena perceraian, kematian pasangan, atau kondisi sosial tertentu. Kejelasan ini memudahkan pelaksana dalam mengarahkan kegiatan sesuai dengan tujuan kebijakan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat variasi tingkat keberhasilan antarwilayah, yang menunjukkan bahwa implementasi belum sepenuhnya merata.

Dari aspek sumber daya, Dinas PPKBP3A telah menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan program. Meskipun secara umum dinilai cukup, masih terdapat keterbatasan pada jumlah pendamping, intensitas monitoring, serta ketersediaan anggaran yang berdampak pada frekuensi dan cakupan kegiatan. Hal ini memengaruhi tingkat keaktifan program di beberapa wilayah.

Dari sisi komunikasi antarorganisasi, koordinasi antara dinas, kecamatan, dan kelurahan telah berjalan melalui rapat koordinasi dan komunikasi informal. Namun, efektivitas komunikasi masih perlu diperkuat terutama dalam menjaga konsistensi informasi dan meningkatkan integrasi lintas sektor agar tidak terjadi perbedaan pemahaman teknis di lapangan.

Karakteristik agen pelaksana menunjukkan bahwa struktur organisasi dan pembagian tugas telah jelas serta didukung oleh SOP sebagai pedoman kerja. Akan tetapi, beban kerja dan dinamika birokrasi masih menjadi tantangan dalam meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas pelaksanaan program.

Disposisi pelaksana secara umum menunjukkan sikap positif, komitmen, dan kepatuhan terhadap pedoman pelaksanaan. Pelaksana memiliki pemahaman yang baik terhadap tujuan program dan menunjukkan kepedulian terhadap kondisi perempuan kepala keluarga. Namun demikian, faktor motivasi dan beban kerja tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar konsistensi pelaksanaan tetap terjaga.

Dari aspek kondisi sosial, ekonomi, dan politik, lingkungan eksternal di Kota Tasikmalaya pada dasarnya mendukung pelaksanaan program. Tingginya kebutuhan perempuan kepala keluarga terhadap pemberdayaan ekonomi menjadi dasar kuat pelaksanaan program. Dukungan kebijakan daerah dan stabilitas politik juga menjadi faktor penguat. Namun, keterbatasan pendidikan, akses pasar, serta beban ganda perempuan kepala keluarga masih menjadi tantangan dalam mencapai hasil yang optimal.

Secara keseluruhan, implementasi Kebijakan Program PEKKA di Kota Tasikmalaya dapat dikategorikan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Variasi tingkat keaktifan program di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi berbagai variabel sebagaimana dijelaskan dalam model Van Meter dan Van Horn.

Faktor-Faktor yang Berperan dalam Implementasi Kebijakan Program PEKKA

Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Kebijakan Program PEKKA di Kota Tasikmalaya dapat diidentifikasi sesuai dengan variabel dalam model Van Meter dan Van Horn, yaitu:

Kejelasan standar dan sasaran kebijakan, yang menjadi dasar arah pelaksanaan program.

Ketersediaan dan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, maupun informasi. Efektivitas komunikasi antarorganisasi, terutama koordinasi lintas sektor dan konsistensi penyampaian informasi.

Karakteristik agen pelaksana, termasuk struktur organisasi, pembagian tugas, serta penerapan SOP.

Disposisi pelaksana, yang meliputi sikap, komitmen, dan tingkat kepatuhan terhadap pedoman pelaksanaan.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik lingkungan, yang memengaruhi partisipasi peserta serta keberlanjutan hasil program.

Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pemerintah daerah terhadap isu pemberdayaan perempuan, sikap positif pelaksana, kebutuhan nyata sasaran terhadap program, serta koordinasi yang relatif berjalan baik.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, beban kerja aparatur, akses ekonomi peserta yang terbatas, serta variasi dukungan lingkungan sosial di masing-masing wilayah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program PEKKA oleh Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal organisasi dan faktor eksternal lingkungan. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kejelasan kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya, kualitas koordinasi, komitmen pelaksana, serta dukungan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Reference

- Agustino. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Anggara, D. S. (2015). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Away. (2016). *Teori& Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Dunn, W. N. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* George C. Edwards III. Texas A & M University.
- Isnaini, N. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Komunitas* (M. . Muhammad Isbab Addainuri (Ed.); 1st Ed.). Alifba Media.
- Jumroh. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik* (Siti Jamalul Insani (Ed.); 1st Ed.). Insan Cendekia Mandiri.
- Kadji. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo
- Kasmad. (2018). *Studi Implementasi*. Kedai Aksara.
- Kristofol. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Lipsky. (1969). *Theory Of Street-Level Bureaucracy*. University Of Wisconsin.
- Lusia, P. (2017). *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan Dan Kesenjangan* (T. Rami, Ghufan, & Kordi (Eds.)). Yayasan Bakti.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 8 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (2015).
- Peraturan Menteri PPPA No 7 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (2022).
- Peraturan Walikota Tasikmalaya No 102 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (2016).
- Rapitasari. (2024). *Pemberdayaan perempuan Di Era Digital* (1st Ed.). PT.Literasi Nusantara Abdai Grup.
- Rizkiyah, R., Handayani, R., & Barkatullah. (2025). *Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai PEKKA*. 2(1), 163–172.
- Sabatier. (2007). *Theories Of The Policy Process*. University Of California, Davis.
- Shabbir, G. (1983). *Decentralization In Developing Countries* (Issue 581). The World Bank.
- Situmorang, D. D. C. (2016). *Kebijakan Publik Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan*. Social Security Development Institute.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Syafriyani. (2023). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Perguruan Tiggi.
- Tachjan. (2015). *Implementasi Kebijakan*. Aipi Bandung.
- Tamaulina. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. CV Saba Jaya Publisher.
- Theresia, M. (2021). *Women Empowerment* (M. S. Dr. Dian Utami Sutiksno. S.E, M. . Dr. Ratnadewi, S.T., & I. Aziz (Eds.); 1st Ed.). Zahir Publishing.
- Van, M. (1975). *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Yizil, U. Y. N., & Rizky, A. F. (2021). *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*. <https://doi.org/26855291>